

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas program telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Manzilatusifa et al. (2023), yang menemukan bahwa UMKM yang mendapatkan dukungan dari program PUMK mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penggunaan modal kerja yang lebih efisien, yang memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan program PUMK yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga membangun kapasitas UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hapsari & Asis (2023) terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan bahwa terdapat tiga bidang program utama yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Otonomi Ekonomi yang menjadi fokus utama dalam CSR pada PT Satriya Jaya Sentosa. Berkenaan dengan efektivitas anggaran program CSR pada PT Satriya Jaya Sentosa, dapat disimpulkan bahwa anggaran tersebut dikatakan kurang efektif dengan besaran tingkat efektifitas sebesar 70%. Sebaliknya, dengan tingkat efisiensi 8% pada anggaran program CSR pada PT Satriya Jaya Sentosa, maka hal ini dapat disimpulkan sangat efisien.

Penelitian oleh Kurniawansyah et al., (2022) terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa, menemukan bahwa pengelolaan anggaran di BKPP Kabupaten Sumbawa sangat baik. Pernyataan tersebut diperoleh dari fakta bahwa pengeluaran langsung telah mencapai realisasi sebesar 94,19% dan rasio "Efektif". Selain itu, pengelolaan pengeluaran tidak langsung telah menunjukkan Tingkat efisiensi sebesar 97,85% dan termasuk dalam kategori "Sangat Efisien".

Penelitian oleh Melisa & Marliyah (2022) terkait Efektivitas Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, menunjukkan bahwa tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan

kemitraan dan inisiatif konstruksi lingkungan saat ini sedang berjalan. Dalam inisiatif konstruksi lingkungan, alokasi bantuan ini sangat efektif dan efisien. Namun, inisiatif kemitraan masih kurang efektif dan efisien karena penyebaran PKBL yaitu dengan memadai kepada masyarakat, mengakibatkan sejumlah besar individu tetap tidak menyadari program dan banyak faktor yang menghambat penyebaran pinjaman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah salah satu teori yang sering kali dibahas dalam ranah akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini telah dimanfaatkan dalam penelitian akuntansi untuk memperluas teori terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Bisnis dan Ekonomi et al., 2021).

Menurut Achmad Badjuri (2021) yang mengutip Yoehana (2013), Perusahaan semakin memahami bahwa keberlangsungan operasinya tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga pada hubungan dengan Masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan. Hal ini selaras dengan Teori Legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Teori ini juga menekankan bagaimana Perusahaan perlu merespon berbagai kelompok pemangku kepentingan guna memperoleh legitimasi atas Tindakan mereka. Selain itu, teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara berkelanjutan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan mereka dilakukan sesuai dengan batasan dan norma sosial yang berlaku.

2.2.2 Teori Stakeholder

Puteri dan Laily (2018) menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah sekelompok orang yang menanggung beberapa bentuk risiko sebagai hasil dari investasi berbentuk modal, sumber daya manusia atau keuangan, sesuatu yang berharga, ke sebuah perusahaan. Selain teori *stakeholder* juga digunakan teori legitimasi dikarenakan kedua teori tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana dalam kinerja lingkungan juga membutuhkan pendekatan legitimasi sehingga dalam teori *stakeholder* selalu dihadirkan dan diperkuat dengan teori legitimasi.

2.2.3 Teori Efektivitas Program

Menurut Setiyowati (2022), efektivitas merupakan program konsep yang mencakup banyak aspek, baik dari dalam maupun luar organisasi. Sehingga untuk menilai efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana output berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin tinggi efektivitas program.

Program memiliki sasaran dan tujuan yang harus dicapai, dan efektivitas program diukur dari sejauh mana aktivitas. Dalam program tersebut mendukung pencapaian tujuan keberhasilan program diukur dari tercapainya tujuan yang telah direncanakan, dengan mengukur efektivitas melalui perbandingan antara output dan tujuan program, serta melibatkan pendapat peserta program sebagai penentu efektivitas.

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya, dan efektivitas berfokus terhadap hasil. Suatu program dinyatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditentukan (Mardiasmo dalam Safitri, 2024). Adapun menurut Mahmudi dalam Safitri (2024) mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut.

Menurut Hilda (2022) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang dapat dilihat melalui penghasilan ataupun pertumbuhan jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2.2.4 Sustainable Development Goals (SDG's)

SDGs, singkatan dari *Sustainable Development Goals*, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup berbagai isu sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai "*Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*". Tujuan ini dirancang untuk menggantikan *Millennium Development Goals*

(MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, SDGs tidak membedakan antara negara "maju" dan "berkembang" melainkan berlaku untuk semua negara.

Menurut Mohammad Ramadhan et al., (2022) mengatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah arah corak pengembangan yang secara umum dituju oleh seluruh pemerintahan dunia dan paradigma baru suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk menghargai berbagai macam permasalahan global dari ekonomi, Kesehatan, penghidupan, kelembagaan, lingkungan sampai ke permasalahan sosial dan kebudayaan.

2.2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep dimana perusahaan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menciptakan keuntungan secara berkelanjutan. Keputusan untuk mengimplementasikan CSR menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan strategi perusahaan. Komisi Eropa mengartikan CSR sebagai suatu proses integrasi dan interaksi antara perusahaan dan masyarakat, yang peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan selama operasional bisnis, serta menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan secara tulus (Haziza & Udayana, 2022).